

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul jika dilihat dari:

1. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi tahun 2019 – 2024 dapat dikategorikan pada kategori Kurang Efisien, karena hasil rata – rata rasio efisiensinya sebesar 97.28% yang terletak pada interval 90% -100%.

2. Rasio Kecerahan

a) Kecerahan belanja operasi terhadap total belanja dapat dikatakan serasi dengan nilai rata – rata rasio kecerahan belanja operasi terhadap total belanja sebesar 64.24% yang berada pada interval >60% - 80%.

b) Kecerahan belanja modal terhadap total belanja dapat dikatakan kurang serasi dengan nilai rata – rata rasio kecerahan belanja modal terhadap total belanja sebesar 35.76% yang berada pada interval >20% - 40%.

Dari dua perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian dana yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul dialokasikan untuk belanja operasi, sehingga menyebabkan rasio belanja modalnya relatif lebih kecil.

3. Analisis Varians Belanja

Dari perhitungan analisis varians belanja Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul tahun 2019 – 2024 sudah dikatakan baik karena nilai realisasi belanja pada tahun 2019 hingga tahun 2024 lebih kecil dari anggaran belanja yang telah ditetapkan.

4. Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan belanja daerah Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul menunjukkan bahwa rasio pertumbuhannya naik sebesar 3.497802135% dan bernilai positif, tetapi fluktuatif, karena setiap tahun rasio pertumbuhannya mengalami kenaikan dan penurunan.

5. Rasio Pertumbuhan SiLPA Belanja

Dari perhitungan rasio pertumbuhan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Belanja Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul diketahui bahwa hasil rata – rata perhitungannya sebesar 34% pada kategori naik.

Secara keseluruhan, 5 analisis ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul telah mengelola APBD dengan baik, sekaligus mengidentifikasi area yang masih memerlukan peningkatan untuk mendukung sektor kebudayaan yang lebih efisien, seimbang, dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul diharapkan untuk lebih meningkatkan efisiensi anggarannya dengan memperkuat kapasitas perencanaan anggaran melalui pelatihan yang berkelanjutan bagi sumber daya manusia (SDM), terutama dalam pemanfaatan teknologi perencanaan keuangan berbasis data.
2. Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul masih perlu mengoptimalisasi kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dengan meningkatkan secara berkala dan sistematis, karena penting untuk mengidentifikasi potensi ketidakefisiensinan sejak dini dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan perbaikan program di tahun yang akan datang. Pembentukan tim khusus pengawasan anggaran di tingkat Dinas juga dapat dipertimbangkan.
3. Dalam melakukan penyeimbangan komposisi Belanja Operasi dan Belanja Modal, sebaiknya Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul menyusun strategi alokasi anggaran yang lebih seimbang, dengan meningkatkan porsi belanja modal untuk mendukung pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan jangka panjang, tanpa mengabaikan kebutuhan operasional yang esensial.
4. Dalam pemanfaatan dan pengelolaan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul disarankan untuk menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan riil dan kapasitas pelaksanaan kegiatan. Disarankan juga untuk mnevaluasi penyebab utama dari sisa lebih anggaran secara mendalam. Ini diperlukan agar alokasi dana benar – benar sesuai

dengan rencana kerja yang dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran.

5. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan memperluas variabel penelitian, seperti analisis efektivitas program, tingkat kepuasan masyarakat, atau dampak sosial dari program kebudayaan yang dilaksanakan. Peneliti juga bisa meneliti sejauh mana peran digitalisasi dan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) dalam mendukung efisiensi dan transparansi penggunaan anggaran.

